



# Audit Dana BOS dan BOSDA Kubu Raya

Jangan Hanya Inspektorat, Auditor BPKP dan BPK Juga Harus Bekerja

"Makanya kita mendukung upaya Inspektorat Kubu Raya melakukan audit terhadap dana BOSDA 2013. Supaya jelas dana tersebut disalurkan sesuai peruntukannya atau tidak, atau diselewengkan atau tidak. Karena penyaluran dana BOS dan BOSDA ini menjadi perbincangan hangat

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar serta Inspektorat Daerah Kubu Raya harus melakukan audit penyaluran dan penggunaan dana BOS dan BOSDA di Kubu Raya. Audit harus dilakukan dimulai dari sekolah, Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Dinas Pendidikan serta Dinas Pendidikan Kubu Raya.

hangat di Kubu Raya. Bahkan ada indikasi BOS dan BOSDA tersebut diselewengkan atau disalurkan tidak tepat sasaran. Atas dasar itulah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan

**PONTIANAK-RK.** Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan dana BOS dari Dinas Pendidikan (Diknas) Kalbar, serta Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dari Dinas Pendidikan Kubu Raya 2013 menjadi perbincangan

Halaman 7



## Audit Dana BOS

.....dari halaman 1

di kalangan masyarakat Kubu Raya," ujar Drs Dede Djunaidi, Ketua Lembaga Pemantau Pembangunan Daerah (LPPD) Kubu Raya kepada Rakyat Kalbar, Senin (3/3).

Dikatakan Dede, bukan hanya BOSDA yang dianggarkan menggunakan APBD Kubu Raya, dana BOS dari Diknas Kalbar juga harus diaudit oleh BPKP. Supaya jelas berapa besar dana BOS Kalbar dan dipergunakan untuk apa dana tersebut. Sama halnya dengan dana BOS dari Kemendikbud untuk Kubu Raya, juga mesti diaudit oleh BPK.

"Dana BOS provinsi maupun BOS pusat harus diaudit secara tuntas. Supaya warga Kubu Raya tahu dimanakan saja dana tersebut. Warga Kubu Raya berhak tahu, karena dana BOS dan BOSDA itu disalurkan untuk menunjang pendidikan anak-anak mereka," ungkap Dede seraya mengatakan Kepala Dinas Pendidikan Kubu Raya juga harus memberikan penjelasan mengenai penyaluran dana BOS dan BOSDA tahun anggaran 2013.

Adapun ketentuan penggunaan dana BOS telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS Tahun 2013. Penggunaan

dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat.

Dikatakan Dede, para kepala sekolah di Kubu Raya yang menerima dana BOS dan BOSDA harus transparan dan memberikan keterangan serta data kepada BPK, BPKP dan Inspektorat yang nantinya akan melakukan audit. Ceritakan fakta yang sesungguhnya, karena kepala sekolah juga rentan terjerat hukum, apabila salah menyalurkan dana BOS dan BOSDA.

"Saya rasa auditnya tentu berawal dari sekolah. Karena yang menyalurkan dana BOS dan BOSDA ini katanya melalui sekolah. Tentunya kepala sekolah yang mesti bertanggungjawab kalau terjadi indikasi penyimpangan. Makanan kepala sekolah harus memberikan penjelasan tentang penyaluran dana BOS dan BOSDA kepada lembaga audit nantinya," tegas Dede.

Tokoh pemuda Kubu Raya ini meminta BPK, BPKP Kalbar dan Inspektorat Kubu Raya menjalin sinergisitas yang baik. Sehingga auditnya menghasilkan persamaan persepsi dalam menuntaskan hal-hal yang berkaitan dengan

penyimpangan anggaran.

"Sinergisitas antara BPKP, BPK dan Inspektorat Kubu Raya itu perlu, untuk mengusut indikasi penyimpangan penyaluran BOS dan BOSDA," papar Dede.

Dede berharap aparaturnya seperti Kejaksaan dan Kepolisian juga harus tanggap. Sebab dampak dari penyimpangan anggaran itu jelas mengakibatkan kerugian negara.

"Aparatur penegak hukum harus respon terhadap hasil audit BPK, BPKP dan Inspektorat Kubu Raya. Jangan seperti kasus BOSDA 2010, ketika dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Kalbar, hingga saat ini belum terdengar tindak lanjut dari proses hukumnya," tegasnya.

Pria berkumis ini juga meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri arah aliran dana BOS dan BOSDA. Selain itu menelusuri aliran dana para pejabat Kubu Raya.

"Karena ada informasi oknum pejabat di Kubu Raya memiliki 11 unit mobil mewah dan rumah seharga miliaran rupiah. Ini perlu ditelusuri, dari mana oknum pejabat itu bisa mengumpulkan harta sebanyak itu," tegas Dede.

Laporan: Andreas  
Editor: Hamka Saptono